

ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID - 19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

Nural Achmad Raainaa¹, Muadz Muawwidz Zahrurrijal², Amrie Firmansyah³

nural_4132230015@pknstan.ac.id¹, rizal_4132230060@pknstan.ac.id²,

amriefirmansyah@upnvj.ac.id³

Politeknik Keuangan Negara STAN¹², Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta³

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menciptakan dinamika signifikan dalam sektor keuangan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Provinsi Bali, sebagai destinasi pariwisata utama, menghadapi tantangan besar akibat penurunan ekonomi global dan lokal yang dipicu oleh pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pandemi tersebut terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pendapatan, belanja, rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas keuangan daerah Provinsi Bali selama periode pandemi COVID-19. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pandemi berdampak pada struktur keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menganalisis data keuangan daerah Provinsi Bali dari tahun 2019 hingga 2022. Data dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yang mencakup pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pemungutan PAD, dan rasio ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah, dengan penurunan tajam pada tahun 2020. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, beberapa daerah di Provinsi Bali menunjukkan fluktuasi yang perlu diperhatikan dalam kinerja keuangan mereka. Rasio kemandirian meningkat pada tahun 2022, menandakan usaha provinsi untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dan pinjaman. Implikasi dari penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika keuangan daerah Provinsi Bali selama pandemi. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan dan strategi keuangan yang adaptif, serta memberikan panduan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Kinerja Keuangan, Provinsi Bali.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has created significant dynamics in the financial sector, especially at the local government level. Bali Province, as a major tourism destination, is facing major challenges due to the global and local economic downturn triggered by the pandemic. This research aims to evaluate the impact of the pandemic on the financial performance of the Regional Government of Bali Province. This research aims to analyze changes in income, expenditure, independence ratio, effectiveness, efficiency, and regional financial activities in Bali Province during the COVID-19 pandemic period. Thus, it is hoped that this research will provide in-depth insight into how the pandemic has impacted regional financial structures. This research uses a descriptive quantitative method by analyzing regional financial data for the Province of Bali from 2019 to 2022. The data is analyzed using financial ratios which include income growth, independence ratio, effectiveness of local revenue (PAD), efficiency of PAD collection, and economic ratio. The research results show that the COVID-19 pandemic had a significant impact on regional income, with a sharp decline in 2020. Despite recovery in subsequent years, several regions in Bali Province showed noteworthy fluctuations in their financial performance. The self-reliance ratio increases in 2022, signaling the province's efforts to reduce dependence on transfers and loans. The implications of this research provide an in-depth understanding of the regional financial dynamics of Bali Province during the pandemic. These findings can serve as a basis for developing adaptive financial policies and strategies, as well as provide guidance for other local governments facing similar challenges.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Financial Performance, Bali Province

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Rantai pasok dunia terganggu, investasi asing menurun, dan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan drastis. Salah satu entitas yang merasakan dampaknya adalah pemerintah daerah Provinsi Bali. Pandemi ini tidak hanya menciptakan tantangan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengubah lanskap ekonomi dan keuangan, memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan fiskalnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun tajam dari 5,02 Persen menjadi 2,97 Persen. Data Bank Dunia juga mencatat peningkatan angka pengangguran dari 5,28 Persen pada tahun 2019 menjadi 7,07 Persen pada tahun 2020. Dalam konteks ini, pemerintah daerah Provinsi Bali, sebagai salah satu pilar ekonomi nasional yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa (Sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal I tahun 2020 tercatat sebesar 2.97%, dipengaruhi oleh penerapan pembatasan aktivitas masyarakat. Kuartal II mengalami penurunan signifikan mencapai -5.32% akibat peningkatan kasus Covid-19 pada bulan Juni, dengan 168.780 orang terkonfirmasi positif (World Health Organization, 2020). Pemerintah segera merespons dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai April 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Kuartal III melanjutkan tren negatif dengan pertumbuhan -3.49%, sementara kuartal IV mengalami perbaikan menjadi -2.17% (Venni et al., 2023). Pada kuartal I tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah, mencapai -0.69%. Namun, kuartal II menandai pertumbuhan tertinggi selama pandemi, mencapai 7.08%, didorong oleh penguatan sektor lapangan usaha dan transportasi (Badan Pusat Statistik, 2021). Bank Indonesia (2021) mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi di kuartal III (3,53%) karena penyebaran varian delta Covid-19, sementara kuartal IV tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5.03%.

Menurut pandangan yang diungkapkan oleh (Puspita & Pangastuti, 2022) laporan keuangan memiliki potensi untuk mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola kebutuhannya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat tercermin melalui kinerja keuangan, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik. Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan oleh analisis menggunakan sejumlah rasio keuangan, seperti rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio ekonomis.

Berdasarkan penelitian (Fajria et al., 2021) dampak pandemi COVID-19 secara signifikan mempengaruhi kinerja ekonomi Provinsi Bali. Pada triwulan IV tahun 2020, meskipun terdapat sedikit perbaikan dibanding triwulan sebelumnya, ekonomi Bali masih mengalami kontraksi sebesar 12,21%. Penurunan ini dipicu oleh kebijakan travel restriction dan lockdown di beberapa negara, yang menghambat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, menekan sektor pariwisata. Perbaikan terbatas ekonomi Bali terutama dipicu oleh kunjungan wisatawan nusantara selama libur natal dan tahun baru. Sementara dari aspek pengeluaran, pemulihan ekonomi Bali terlihat dari konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri. Secara keseluruhan, ekonomi Bali mengalami kontraksi sebesar 9,31% pada tahun 2020, yang lebih rendah dibanding pertumbuhan positif tahun 2019. Adanya kebijakan travel restriction sejak Maret 2020 juga menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi positif di kabupaten/kota Provinsi Bali yang pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Masalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana tergambar pada fenomena yang dialami Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali di atas, dapat dianggap sebagai isu makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan ekonomi makro. Dalam konteks makro ekonomi, peran Pemerintah sebagai regulator kebijakan dan pembuat undang-undang memiliki dampak signifikan. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tahun 2004, Pemerintah menggantinya dengan Undang-Undang No. 32 dan No. 34 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut menekankan pada kewenangan daerah tanpa menciptakan delegasi dan desentralisasi fiskal menjadi konsekuensi langsung dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan kepada daerah. Desentralisasi fiskal ini mencakup pengaturan dan upaya untuk mencapai perimbangan keuangan secara vertikal antara pusat dan daerah, bertujuan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut (Fajria et al., 2021).

Pandemi ini tidak hanya merubah cara hidup masyarakat tetapi juga memaksa adanya pembatasan dalam aktivitas ekonomi. Protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, secara langsung mempengaruhi kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia. Provinsi Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata utama, menjadi salah satu yang paling terpuak. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari industri pariwisata, dan sebagian besar pengunjung berasal dari luar negeri. Ketergantungan yang tinggi pada wisatawan asing membuat dampak ekonomi pandemi Covid-19 sangat terasa di Provinsi Bali. Berkurangnya jumlah turis, pembatasan perjalanan, dan penutupan tempat wisata telah memberikan pukulan keras pada sektor pariwisata di pulau ini.

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali dengan membaginya ke dalam empat fase kritis. Fase-fase tersebut melibatkan tahun 2019, yang mencerminkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 melanda, tahun 2020 yang merepresentasikan periode pertama kali saat pandemi berlangsung, tahun 2021 yang menandai fase peralihan, dan tahun 2022 yang menggambarkan masa pasca-pandemi atau endemi. Keempat fase ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik terhadap dampak pandemi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali, memungkinkan identifikasi perubahan signifikan dalam laporan keuangan selama periode tersebut.

Kami menganalisis rasio keuangan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, namun, dalam laporan ini, fokus kami tertuju pada empat kabupaten utama, yaitu Badung, Bangli, Buleleng, dan Gianyar. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan keterbatasan jumlah halaman serta penekanan peneliti pada kabupaten-kabupaten tersebut, yang mana mengalami penurunan ekstrem dan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan di Provinsi Bali. Dengan memusatkan analisis pada kabupaten-kabupaten ini, kami dapat menggambarkan dengan lebih mendetail dampak pandemi COVID-19 terhadap aspek keuangan, seperti pendapatan, belanja, rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas keuangan daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif Deskriptif, yang dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur sejauh mana terjadinya perubahan dan variasi dalam indikator keuangan selama periode pandemi (Sugiyono, 2018). Data keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan diambil dari Data APBD, yang mencakup periode sebelum, selama, dan setelah pandemi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder dan data primer. Data sekunder akan diperoleh dari Data APBD Provinsi Bali yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui laman resminya. Sementara itu, data primer akan diperoleh dari jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap keuangan pemerintah daerah. Sumber data primer ini akan memberikan konteks dan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja keuangan. Penggunaan kombinasi data sekunder dan primer diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Pertumbuhan

Rumus rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{(\text{Total Pendapatan } t1 - \text{Total Pendapatan } t - 1)}{\text{Total Pendapatan } t - 1}$$

$$\text{Pertumbuhan Total Belanja} = \frac{(\text{Total Belanja } t1 - \text{Total Belanja } t - 1)}{\text{Total Belanja } t - 1}$$

Tabel 1. Perhitungan Rasio Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan TA 2019 - 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022
PROVINSI BALI	6,17%	-13,95%	3,58%	-0,31%
Badung	6,88%	-32,57%	-30,67%	4,88%
Bangli	6,50%	-14,23%	13,65%	-3,89%
Buleleng	11,48%	-12,47%	3,99%	-0,20%
Gianyar	15,29%	-18,37%	-15,27%	33,32%

Berdasarkan data rasio pertumbuhan pada Tabel 4 untuk Provinsi Bali dan beberapa kabupaten/kota di dalamnya (Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar), dapat ditarik beberapa analisis terkait dengan dinamika keuangan pemerintah daerah dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, Provinsi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 6,17%, menunjukkan kinerja ekonomi yang positif. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan sebesar -13,95%, yang dapat diatributkan kepada dampak pandemi Covid-19. Perubahan APBD dan alokasi anggaran yang dilakukan untuk penanganan pandemi mungkin menjadi faktor utama dalam pertumbuhan negatif ini. Pada tahun 2021, Provinsi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 3,58%, menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah tahun sebelumnya yang sulit. Meskipun pertumbuhan tetap positif, tahun 2022 mencatat pertumbuhan yang sedikit negatif sebesar -0,31%, yang dapat menjadi sinyal perhatian bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki strategi keuangan.

Badung, Bangli, Buleleng, dan Gianyar, masing-masing mengalami dinamika pertumbuhan yang berbeda dari tahun ke tahun. Badung, pada tahun 2019, mencatat pertumbuhan sebesar 6,88%, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 (-

32,57%). Pada tahun 2021 dan 2022, terjadi pemulihan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -30,67% dan 4,88%. Bangli mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2019 (6,50%) dan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 (-14,23%). Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan positif sebesar 13,65%, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar -3,89%. Buleleng, mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2019 (11,48%) dan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 (-12,47%). Pada tahun 2021, kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,99%, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan yang minimal sebesar -0,20%. Gianyar mencatat pertumbuhan tinggi pada tahun 2019 (15,29%) dan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 (-18,37%). Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan negatif lagi sebesar -15,27%, namun pada tahun 2022 mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 33,32%.

Tabel 2. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Belanja TA 2019 - 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022
PROVINSI BALI	8,66%	-2,46%	-1,38%	7,63%
Badung	-1,13%	-32,38%	-27,51%	-4,07%
Bangli	-0,86%	-13,53%	10,45%	11,82%
Buleleng	9,18%	-11,00%	3,20%	0,45%
Gianyar	8,92%	-6,14%	-9,10%	11,01%

Provinsi Bali Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif sebesar 8,66%. Namun, pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar -2,46%. Pada tahun 2021 dan 2022, belanja kembali mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar -1,38% dan 7,63%. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020, namun belanja berhasil pulih dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Badung Pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan positif sebesar -1,13%. Namun, pada tahun 2020, mengalami penurunan yang signifikan sebesar -32,38%. Pada tahun 2021 dan 2022, belanja kembali mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -27,51% dan -4,07%. Bangli Pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan negatif sebesar -0,86%. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan sebesar -13,53%. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, belanja kembali mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 10,45% dan 11,82%. Pada tahun 2019 Buleleng mencatat pertumbuhan positif sebesar 9,18%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 (-11,00%), belanja kembali mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 (3,20%) dan tahun 2022 (0,45%). Meskipun pertumbuhannya tidak signifikan, namun menandakan adanya upaya pemulihan. Gianyar mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2019 (8,92%), namun mengalami penurunan pada tahun 2020 (-6,14%). Pada tahun 2021, belanja kembali mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,10%. Namun, pada tahun 2022, Gianyar mencatat pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 11,01%. Hal ini mungkin mencerminkan kebijakan pemulihan ekonomi yang berhasil.

Secara umum semua daerah di Provinsi Bali mengalami dampak negatif pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, terutama pada pendapatan. Beberapa daerah, seperti Gianyar, mampu pulih dengan cepat dan mencatat pertumbuhan positif yang signifikan pada tahun 2022. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, penting untuk daerah-daerah ini terus mengoptimalkan kebijakan fiskal, termasuk alokasi anggaran, untuk memitigasi risiko dan mendukung pemulihan ekonomi. Analisis ini sejalan dengan (Dewantara & Nufitasari, 2021) yang menyatakan bahwa dampak pandemi terhadap kinerja keuangan daerah dapat sangat bervariasi tergantung pada kebijakan dan langkah-langkah pemulihan yang diambil oleh pemerintah daerah masing-masing.

Rasio Kemandirian

Rumus untuk menghitung rasio kemandirian pada Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Provinsi Bali TA 2019 – 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
PROVINSI BALI	60,54%	53,68%	52,63%	65,42%	58,06%
Badung	83,47%	54,20%	64,63%	96,22%	74,63%
Bangli	10,77%	10,31%	14,22%	13,03%	12,08%
Buleleng	15,98%	15,92%	18,82%	19,75%	17,62%
Gianyar	43,20%	28,96%	27,40%	40,97%	35,13%

Rasio kemandirian Provinsi Bali pada tahun 2019 sebesar 60,54%, mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan yang berada pada kategori sedang. Pola hubungan dapat diklasifikasikan sebagai partisipatif. Pada tahun 2020 Terjadi penurunan rasio kemandirian menjadi 53,68%, yang masih berada dalam kategori sedang. Pola hubungan tetap partisipatif. Namun pada 2021 Rasio kemandirian sedikit menurun menjadi 52,63%, tetapi masih berada pada kategori sedang. Pola hubungan tetap partisipatif. Pada 2022 Terjadi peningkatan signifikan rasio kemandirian menjadi 65,42%, menunjukkan perbaikan yang substansial. Provinsi Bali masuk ke dalam kategori tinggi, dan pola hubungan dapat diklasifikasikan sebagai delegatif. Rata-rata rasio kemandirian selama periode ini mencapai 58,06%, menjadikan Provinsi Bali tetap dalam kategori sedang, mendekati tingkat kemandirian tinggi.

Badung Menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi pada tahun 2019 (83,47%), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, dan kembali meningkat pada tahun 2022. Badung masuk ke dalam kategori tinggi sepanjang periode. Bangli Memiliki tingkat kemandirian yang rendah sepanjang periode, namun mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Masih berada dalam kategori rendah. Buleleng Menunjukkan peningkatan tingkat kemandirian yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2022, masuk ke dalam kategori tinggi. Gianyar Mengalami fluktuasi tingkat kemandirian, namun secara keseluruhan tetap dalam kategori sedang.

Provinsi Bali pada tahun 2022 mencapai tingkat kemandirian tinggi, yang mencerminkan pola hubungan yang lebih delegatif dengan pemerintah pusat. Selama tahun 2019-2021, pola hubungan lebih partisipatif, menandakan adanya intervensi atau dukungan pemerintah pusat dalam mendukung keuangan Provinsi Bali. Rasio kemandirian Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2019-2022. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, menjadikan Provinsi Bali masuk ke dalam kategori tinggi dan pola hubungan yang bersifat delegatif. Pola hubungan partisipatif pada tahun-tahun sebelumnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widasari & Jahja, 2023) yang menyatakan bahwa dinamika kemandirian keuangan daerah dapat mengalami fluktuasi yang signifikan. Penelitian ini mendukung temuan bahwa Provinsi Bali pada tahun 2022 mencapai tingkat kemandirian yang tinggi, mencerminkan pola hubungan yang lebih delegatif dengan pemerintah pusat. Selama tahun 2019-2021, pola hubungan yang lebih partisipatif menunjukkan adanya intervensi atau dukungan pemerintah pusat dalam mendukung keuangan Provinsi Bali. Hal ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai keterkaitan antara hasil penelitian (Widasari & Jahja, 2023) dengan dinamika

kemandirian keuangan Provinsi Bali. Temuan ini menekankan pentingnya memperhatikan faktor-faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat dalam membentuk pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia.

Rasio Efektivitas

Rumus untuk menghitung rasio Efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah PAD}}$$

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Bali TA 2019-2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
PROVINSI BALI	112,14%	81,58%	98,13%	128,76%	105,15%
Badung	71,19%	39,92%	62,18%	131,32%	76,15%
Bangli	91,28%	63,12%	156,87%	84,90%	99,04%
Buleleng	83,07%	79,31%	109,38%	97,67%	92,36%
Gianyar	100,85%	44,37%	48,62%	92,75%	71,65%

Rasio efektivitas kinerja keuangan Provinsi Bali dan beberapa pemerintah daerah di sana dapat dianalisis sebagai berikut. Rasio efektivitas Provinsi Bali selama periode 2019-2022 menunjukkan kategori "Sangat Efektif" dengan rata-rata sebesar 105,15%. Pada tahun 2019, Provinsi Bali telah mencapai 112,14% dari target penerimaan PAD, menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan efektivitas menjadi 81,58%, namun masih tetap dalam kategori efektif. Tahun 2021 mengalami peningkatan efektivitas kembali menjadi 98,13%, dan pada tahun 2022, Provinsi Bali mencapai tingkat efektivitas tertinggi sebesar 128,76%.

Badung menunjukkan variasi tingkat efektivitas yang signifikan. Pada tahun 2019, Badung mencapai tingkat efektivitas yang sangat tinggi (71,19%), tetapi mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 (39,92%). Namun, pada tahun 2021, efektivitas kembali meningkat hingga 62,18%, dan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2022 sebesar 131,32%. Bangli memiliki variasi yang cukup besar dalam tingkat efektivitasnya. Pada tahun 2021, efektivitasnya mencapai tingkat tertinggi sebesar 156,87%, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mencapai target penerimaan PAD. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan tajam menjadi 84,90%, menciptakan fluktuasi yang perlu mendapat perhatian. Buleleng menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup stabil sepanjang periode. Pada tahun 2019 hingga 2022, efektivitasnya berada dalam kategori efektif hingga sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 92,36%. Gianyar menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam tingkat efektivitas. Pada tahun 2019 dan 2022, efektivitasnya mencapai tingkat sangat efektif, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis.

Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah mencapai atau melebihi target penerimaan PAD, yang secara keseluruhan Provinsi Bali mencapai kategori "Sangat Efektif". Variasi tingkat efektivitas di antara pemerintah daerah dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi performa mereka dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemantauan fluktuasi dan tren efektivitas perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan perencanaan kebijakan keuangan yang lebih efektif di masa depan.

Hasil analisa rasio efektivitas kinerja keuangan Provinsi Bali yang menunjukkan kategori "Sangat Efektif" selama periode 2019-2022 secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Primahadi & Kurniawan, 2021) yang menyatakan efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan

daerah yang optimal. Temuan bahwa Provinsi Bali mampu secara konsisten mencapai atau melebihi target penerimaan PAD, seperti yang diukur melalui rasio efektivitas, memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang mengamati faktor-faktor yang mendukung kemandirian keuangan daerah. Meskipun rinciannya tidak disebutkan, hasil penelitian ini memberikan konteks penting untuk memahami bahwa keefektifan dalam pengelolaan pendapatan daerah berdampak langsung pada tingkat kemandirian keuangan, yang merupakan temuan yang relevan dan konsisten dengan literatur terdahulu.

Rasio Efisiensi

Analisis rasio efisiensi dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi pemborosan dalam operasionalnya. Berikut adalah rumus untuk mengukur rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Bali TA 2019 – 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
PROVINSI BALI	98,09%	111,19%	105,87%	114,29%	107,36%
Badung	98,98%	99,26%	103,79%	94,93%	99,24%
Bangli	98,39%	99,19%	96,39%	112,15%	101,53%
Buleleng	98,49%	100,14%	99,38%	100,03%	99,51%
Gianyar	96,56%	111,03%	121,15%	100,88%	107,41%

Rasio Ekonomi

Berikut merupakan rumus rasio ekonomi:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}}$$

Tabel 9. Perhitungan Rasio Ekonomi Provinsi Bali TA 2019 – 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
PROVINSI BALI	95,38%	87,33%	73,45%	110,60%	91,69%
Badung	72,20%	61,52%	73,95%	82,89%	72,64%
Bangli	85,36%	81,36%	96,19%	98,70%	90,40%
Buleleng	93,51%	85,47%	88,05%	97,70%	91,18%
Gianyar	83,73%	68,84%	71,69%	91,44%	78,93%

Rasio ekonomi Provinsi Bali selama periode 2019-2022 dapat memberikan wawasan yang bermanfaat terkait dengan efisiensi dan fokus pengeluaran daerah. Rasio belanja operasi, yang mencerminkan proporsi total belanja yang dialokasikan untuk kegiatan operasional, menunjukkan tingkat aktivitas dan keberlanjutan pelayanan publik. Selama periode tersebut, rata-rata rasio belanja operasi Provinsi Bali mencapai 91,69%, menggambarkan komitmen yang cukup tinggi dalam memastikan operasional pemerintahan dan keberlanjutan layanan. Dalam analisis lebih mendalam, Badung menunjukkan variasi tingkat ekonomi yang signifikan, dengan rata-rata rasio belanja operasi sebesar 72,64%. Hal ini menunjukkan kecenderungan Badung untuk lebih fokus pada kegiatan operasional dibandingkan dengan belanja modal. Sebaliknya, Bangli dan Buleleng menunjukkan rasio belanja operasi yang cukup tinggi, mencapai rata-rata masing-masing sebesar 90,40% dan 91,18%, menunjukkan prioritas yang kuat pada

kegiatan operasional.

Gianyar meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022, masih memiliki rata-rata rasio belanja operasi sebesar 78,93%. Meskipun angka ini mengindikasikan fokus pada operasional, fluktuasi tahun demi tahun menunjukkan kemungkinan penyesuaian prioritas dan alokasi dana. Sementara itu, rasio belanja modal yang mengukur proporsi total belanja yang diarahkan untuk investasi dan pengembangan daerah menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Rata-rata rasio belanja modal Provinsi Bali mencapai 8,31%, menandakan upaya terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan dan investasi daerah. Meskipun Badung menunjukkan rasio belanja modal yang sedikit lebih tinggi, mencapai rata-rata 27,36%, perlu diperhatikan bahwa fokus pada belanja modal masih bisa ditingkatkan di seluruh provinsi.

Analisis rasio ekonomi ini memberikan pandangan yang penting tentang kebijakan anggaran dan prioritas pengeluaran Provinsi Bali serta pemerintah daerah di dalamnya. Dengan memahami keseimbangan antara belanja operasi dan modal, provinsi dapat mengoptimalkan alokasi dana untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lantemona et al., 2020) yang menyatakan peningkatan dalam belanja modal dapat memberikan dampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan daerah.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan yang luar biasa terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, tercermin dalam hasil penelitian ini. Ringkasan keseluruhan hasil penelitian memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak pandemi terhadap pendapatan, belanja, kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas keuangan daerah. Dalam menghadapi turbulensi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, Provinsi Bali dan pemerintah daerah di dalamnya telah menunjukkan ketangguhan dalam mengelola keuangan daerah. Meskipun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, beberapa langkah kebijakan telah diambil untuk memitigasi dampak negatif tersebut. Tanda-tanda pemulihan ekonomi pada tahun 2021 memberikan harapan, meskipun tahun 2022 menunjukkan tantangan baru.

Pertumbuhan pendapatan yang positif pada tahun 2019 telah tergantikan oleh penurunan tajam pada tahun 2020, dengan pandemi memberikan dampak langsung pada sektor-sektor ekonomi. Meskipun adanya pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, perlu perhatian khusus terhadap strategi keuangan guna mengatasi ketidakpastian yang masih berlanjut. Rasio kemandirian yang meningkat pada tahun 2022 memberikan sinyal positif, menunjukkan usaha Provinsi Bali untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dan pinjaman. Meskipun demikian, fluktuasi tingkat kemandirian di beberapa daerah menekankan perlunya pengelolaan keuangan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Rasio efektivitas yang tinggi sepanjang periode menandakan keberhasilan dalam pencapaian target pendapatan PAD, mengindikasikan upaya-upaya yang diterapkan untuk memaksimalkan penerimaan daerah. Meskipun demikian, variasi efektivitas di antara daerah menyoroti pentingnya penyesuaian strategi yang spesifik dengan kondisi masing-masing. Rasio efisiensi yang cukup baik, terutama dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencerminkan usaha Provinsi Bali untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Tingkat efisiensi yang tetap tinggi dapat menjadi landasan untuk pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan optimal.

Analisis rasio aktivitas menyoroti fokus yang tinggi pada belanja operasi, yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan pelayanan publik. Meskipun demikian,

terdapat peluang untuk meningkatkan alokasi dana pada belanja modal untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan jangka panjang. Secara keseluruhan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama masa pandemi COVID-19. Dengan menyusun strategi kebijakan yang tepat dan adaptif, Provinsi Bali dapat terus menghadapi tantangan ekonomi dan membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, D. N., Ningsih, P. A., & Rahma, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur. *JREA (Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi)*, 1(1), 125–140.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Aribowo, N. C., Damayanti, A. Y., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Manajemen Utang Terhadap Penilaian Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2022. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 6(1), 57–65.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021 Tumbuh 7,07 Persen (y-on-y)*. BPS Indonesia.
- Darwis, D., Meylinda, M., & Suaidah, S. (2022). Pengukuran Kinerja Laporan Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Profitabilitas Pada Perusahaan Go Public. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(1), 19–27. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i1.1875>
- Dewantara, R., & Nufitasari, D. (2021). Politik Hukum Pengaturan Mengenai Tindakan Pencegahan Non Performing Loan Pada Bank Dalam Masa Pandemi Dengan Pendekatan Konsep Bifurkasi Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 66–83. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.176>
- DJPK Kemenkeu. (2023). Portal Data APBD. Diolah dari DJPK Kemenkeu.
- Fajria, Z., Wahono, B., & Farida, E. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19. *Riset Manajemen*, 10, 1–20.
- Lantemona, I. A., Koleangan, R. A. M., & Walewangko, E. N. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Penyaluran Kredit Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(2), 30–43.
- Loise, M. (2023). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Parkir di Kota Makassar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(6), 4773–4782.
- Maria, E., Kristen, U., Wacana, S., & Halim, A. (2021). E-GOVERNMENT DAN KORUPSI: STUDI DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Efficiency and Effectiveness of Regional Original Revenue of Banggai Regency. *Jurnal Sinar Manajemen*, 08, 90–97.
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>

- Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti*, 15(1), 90–104. <https://doi.org/10.52353/ama.v15i1.246>
- Putra, M. W., Darwis, D., & Priandika, A. T. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Kasus: CV Sumber Makmur Abadi Lampung Tengah). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v1i1.889>
- Putri, P. (2020). Excel Mempermudah Penyusunan Laporan Keuangan. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 50–58. <https://doi.org/10.30596/jp.v4i2.6321>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Venni, R., Ahmad, A. W., & Maryati, U. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1134. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1372>
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43.
- Widasari, R., & Jahja, A. S. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat). *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(06), 1279–1289.
- Widiastoeti, H., & Sari, C. A. E. (2020). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Sak- Pada Umkm Kampung Kue Di Rungkut Surabaya. *Jurnal Analisi, Predeksi Dan Informasi (Jurnal EKBIS)*, 21(1), 1–15.
- Yahya Dwi, W., & Muna Wardah, A. (2021). Pengujian Blackbox Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan Pt Inka (Persero) Berbasis Equivalence Partitions Blackbox Testing of Pt Inka (Persero) Employee Performance Assessment Information System Based on Equivalence Partitions. *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, 4(1), 22–26.
- Yulianti, V., Wulandari, D. S., & Sopiah, S. (2023). Analisis Stabilitas Keuangan dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Pendekatan Teori Keagenan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 519–528. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.643>
- Zaki, A., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Article Information. Jekobs*, 2(1), 23–37.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 61–74.